

OMBUDSMAN BONGKAR DUGAAN MALADMINISTRASI POLISI DALAM KASUS NOVEL BASWEDAN

Selasa, 06 Februari 2018 - Indra

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membongkar dugaan praktik maladministrasi oleh jajaran Polda Metro Jaya. Hal itu terkait penyelidikan kasus teror penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

Temuan Ombudsman berupa indikasi kesalahan dalam administrasi yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya kepada Muhammad Lestaluhu. Sedangkan Lestaluhu sendiri pernah diperiksa jajaran Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus penyelidikan teror Novel Baswedan.

Komisioner Ombudsman, Adrianus Meliala mengatakan, indikasi maladministrasi tersebut yakni ketika jajaran Korps Bhayangkara memeriksa M. Lestaluhu tanpa disertakan surat panggilan. Ketika itu, sambung Adrianus, Lestaluhu langsung dijemput paksa oleh jajaran Ombudsman.

"Ketika mereka memanggil Lestaluhu ternyata mereka memanggilnya lewat telepon, harusnya surat dulu jalan, baru orangnya datang," kata Adrianus di kantornya, di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).

Menurut Adrianus, pihak kepolisian belum melengkapi surat-surat pemanggilan Lestaluhu sebagai saksi. Namun, pihak kepolisian malah lebih dahulu menjemput Lestaluhu dengan alibi takut kehilangan jejak.

"Maka saya bilang segera penuhi surat suratnya, lengkapi jadi prosesnya jadi benar administratifnya jadi benar tapi apakah setelah dipanggil Lestaluhu terungkap kan belum tentu," terangnya.

Akibat dari penjemputan dan penginapan selama dua hari di markas kepolisian, Lestaluhu kehilangan pekerjaan. Dari situlah, Lestaluhu kemudian melaporkan ke Ombudsman dan kemudian ditindak lanjuti.

"Bahwa kegiatan memanggilnya itu berimplikasi pada pekerjaannya si ML (Muhammad Lestaluhu) memang bukan urusannya polisi sih tapi mestinya peka kalau sudah dipanggil berkali-kali itu kan udah lalu kemudian tempat bekerja dia gusar kan seakan akan bahwa dia adalah pembunuhnya," terangnya.